

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR DALAM  
MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN**

**Santri Imam, Meyzi Hariyanto, dan Harapan Tua R.F.S**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Kampus Bina Widya. Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Panam, Pekanbaru 28293

**Abstract: Implementation of Regional Regulation No. 12 of 2012 concerning the Medium-Term Development Plan of the Kampar District in Improving Community Economy.** The purpose of this study was to determine the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2012 concerning the Kampar Regency Regional Medium-Term Development Plan in improving the people's economy in the Kampar Kiri Hilir Sub-District Management Unit and the inhibiting factors in the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2012 concerning the Medium-Term Development Plan Kampar District in improving the people's economy in the Unit of Management of the One-Day Activities of the Kampar District of Hilir Kiri. The results showed that the implementation of Local Regulation Number 12 of 2012 regarding the Kampar Regency Regional Medium-Term Development Plan in improving the people's economy in the Kampar Kiri Hilir District of the One-day Activity Management Unit there are several factors that must be considered yatu communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

**Key words:** local regulations, community-based economy

**Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada Unit Pengelola Kegiatan Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada Unit Pengelola Kegiatan Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada Unit Pengelola Kegiatan Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yatu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

**Kata kunci:** peraturan daerah, ekonomi kerakyatan masyarakat

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi dilaksanakan secara terpadu, selaras, seimbang dan berkelanjutan dan diarahkan agar pembangunan yang berlangsung merupakan kesatuan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi nasional memerlukan adanya pembangunan ekonomi daerah yang pada akhirnya mampu mengurangi ketimpangan antar daerah dan mampu mewujudkan kemakmuran yang adil dan merata antar daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, sangat ditentukan

oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisien. Penentuan kebijakan pembangunan haruslah memperhatikan kondisi internal maupun perkembangan eksternal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat (1) mengamanatkan bahwa “pemerinta-

han daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah,” kemudian ayat (2) “dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.” Hakikat dari undang-undang tersebut agar pemerintah daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi dan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah.

Sebagaimana diketahui kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi sesuai dengan pendapat para ahli dari aliran teori strukturalis. Santoso (2010:50) mengemukakan bahwa strategi pembangunan ekonomi di negara berkembang akan lebih baik jika menggunakan strategi pembangunan berupa penciptaan lapangan kerja, reinvestasi, pemenuhan kebutuhan hidup pokok, pengembangan sumberdaya manusia, mengutamakan sektor pertanian, mengembangkan sektor pedesaan terpadu dan penataan ekonomi nasional, sedangkan strategi pembangunan dalam era otonomi harus mengacu kepada berkembangnya otonomi daerah dan semakin meningkatnya kemandirian dan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, yang bermuara kepada tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, berkurangnya penduduk miskin dan desa tertinggal serta meningkatnya partisipasi aktif dari masyarakat. Sejalan dengan pendapat diatas menurut Sumondiningrat (2010:58) dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera dibutuhkan strategi pembangunan yang berkelanjutan yang pada hakekatnya berorientasi

kepada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan manusia dengan mengikutsertakan segala lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, disamping itu pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu proses yang muncul dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk dinikmati oleh masyarakat secara berkesinambungan.

Model pembangunan yang berpusat kepada rakyat sebagai subjek dan objek pembangunan memandang inisiatif dan kreatifitas rakyat sebagai sumber utama pembangunan dan memandang kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan yang harus dicapai. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Kampar maka pemerintah Kabupaten Kampar membuat konsep pembangunan daerah yang disebut Lima Pilar Pembangunan Kampar yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar. Yang di dalamnya memuat misi yang akan dituju oleh Pemerintah Kabupaten Kampar yaitu:

- 1) Mengembangkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, menjunjung tinggi syariat agama, taat hukum, berbudaya yang menjamin sistem sosial bermasyarakat dan bernegara dalam menghadapi tantangan global.
- 2) Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi masyarakat untuk membangun pondasi ekonomi kerakyataan yang kokoh.
- 3) Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermartabat melalui penguasaan IPTEK yang ditopang oleh sendi-sendi ilmu, iman dan peradaban untuk menghasilkan manusia yang berdaya saing global.
- 4) Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kelima misi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kampar menjabarkan kedalam 5 (lima) pilar pembangunan, yakni:

- 1) Peningkatan akhlak dan moral
- 2) Meningkatkan ekonomi kerakyatan
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia
- 4) Meningkatkan pelayanan kesehatan
- 5) Meningkatkan infrastruktur

Adapun fokus penelitian penulis terlatak pada pilar meningkatkan ekonomi kerakyatan dimana adanya usaha Pemerintah Kabupaten Kampar untuk pengentasan kemiskinan di wilayahnya salah satunya dengan membuat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang diberinama UPK Sehati yang berada di Kecamatan Kampar Kiri Hilir.

Adapun program-program peningkatan ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar di wilayahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
- 2) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
- 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- 4) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM
- 5) Program Pemutakhiran Data Koperasi dan UKM Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah
- 6) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperas
- 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sementara itu upaya peningkatan ekonomi kerakyatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar di Kecamatan Kampar Kiri Hilir yaitu melalui program pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dimana dari program pengembangan usaha ekonomi masyarakat ini diharapkan dapat membantu masyarakat Kampar Kiri Hilir mengembangkan usaha dan pemasaran yang didukung permodalan dengan persyaratan yang mudah, murah dan cepat, sehingga hasilnya secara nyata akan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga-

nya, sehingga akan dapat membantu mempercepat proses kemandirian masyarakat di wilayah tersebut. Dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di Kecamatan Kampar Kiri Hilir ini dilakukan untuk memberikan penguatan permodalan kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat di pedesaan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sehati guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sehingga dapat membantu mempercepat proses kemandirian masyarakat.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir berdiri sejak tahun 2014 adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) yang merupakan prioritas usulan dan berfungsi membantu pengelolaan kegiatan termasuk menyalurkan dana bantuan masyarakat dalam PNPM. Dalam melaksanakan kegiatannya UPK Sehati bertanggung jawab terhadap Forum Musyawarah Antar Desa sebagai wakil masyarakat se kecamatan Kampar Kiri Hilir, saat ini UPK Sehati tidak lagi hanya sebagai kasir (Juru Bayar) namun lebih dari itu juga ikut bertanggung jawab terhadap sukses tidaknya semua kegiatan PNPM di Kecamatan Kampar Kiri Hilir

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sehati, tujuan dibentuknya UPK ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan usaha dengan berbasis sumber daya potensi lokal.
- 2) Meningkatkan kemandirian masyarakat di pedesaan di Kecamatan Kampar Kiri Hilir dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang produktif guna peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- 3) Menggali potensi lokal yang terdapat di wilayah masing-masing guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta aksesibilitas bagi kelompok masyarakat dalam pengelolaan usaha di bidang jasa, perdagangan, industri/kerajinan dan pertanian agar mampu mengembangkan diri melalui inovasi-inovasi ber-

orientasi pada kebutuhan kelompok usaha masyarakat.

Sementara itu beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UPK Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat diantaranya:

- 1) Membuka rekening program di bank
- 2) Menyalurkan dana bantuan PNPM ke desa
- 3) Memberikan bimbingan administrasi dan keuangan kepada desa-desa penerima bantuan PNPM
- 4) Melestarikan dana bantuan bergulir berupa Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
- 5) Melakukan pencatatan serta membuat pelaporan berkala tentang perkembangan dana dan kegiatan yang dikelola serta mempertanggungjawabkannya kepada Forum MAD.
- 6) Melakukan identifikasi potensi cara mengembangkan hubungan dengan pihak

luar, seperti pemasaran, bantuan manajemen dan sejenisnya.

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan oleh UPK Sehati dalam rangka meningkatkan ekonomi rakyat di Kecamatan Kampar Kiri Hilir sejauh ini belum terlaksana dengan maksimal disebabkan oleh faktor seperti komunikasi, sumber daya, faktor disposisi dan faktor struktur birokrasi. Berdasarkan pengamatan awal penulis dilapangan diketahui fenomena masalah yang terjadi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Lemahnya sumberdaya manusia pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat yang dilaksanakan oleh UPK Sehati kepada masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hilir sehingga mengakibatkan program kegiatan yang sudah direncanakan tersebut progresnya tidak berjalan secara maksimal.

**Tabel 1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan UPK Sehati Tahun 2018**

No	Nama Kegiatan	Target Kegiatan (%)	Realisasi Kegiatan (%)
1	Membuka rekening program di bank	100	75
2	Menyalurkan dana bantuan PNPM ke desa	100	45
3	Memberikan bimbingan administrasi dan keuangan kepada desa-desa penerima bantuan PNPM	100	80
4	Melestarikan dana bantuan bergulir berupa Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)	100	56
5	Melakukan pencatatan serta membuat pelaporan berkala tentang perkembangan dana dan kegiatan yang dikelola serta mempertanggungjawabkannya kepada Forum MAD.	100	72
6	Melakukan identifikasi potensi cara mengembangkan hubungan dengan pihak luar, seperti pemasaran, bantuan manajemen dan sejenisnya.	100	66

*Sumber Data: Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sehati tahun 2018*

- 2) Masih tingginya hutang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sehati dalam rangka implementasi pilar meningkatkan ekonomi rakyat di Kecamatan Kampar Kiri Hilir sehingga mengakibatkan neraca keuangan organisasi UPK Sehati masuk kate-

gori tidak sehat dan berdampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat dan pihak ketiga terhadap kinerja UPK Sehati dalam mengelola dana Pemerintah Kabupaten Kampar.

**Tabel 2. Laporan Neraca Keuangan Unit Pengelola Kegiatan Sehati Per Desember 2018**

<b>PASIVA</b>		
<b>1.</b>	<b>HUTANG</b>	<b>JUMLAH</b>
a.	Hutang ke Pihak-3	
b.	Bantuan RTM	<b>12.296.615</b>
c.	Pengembangan Kelembagaan	<b>28.692.102</b>
<b>2.</b>	<b>MODAL</b>	
a.	Modal alokasi BLM UEP	124.112.000
b.	Modal alokasi BLM SPP	1.090.000.000
c.	Alokasi Operasional 2%	48.966.554
d.	Modal lain-2 (donasi dsb)	
e.	Surplus Ditahan(s/d 2017)	1.173.862.910
f.	Surplus/defisit Berjalan 2018	29.879.350
<b>Total Pasiva</b>		<b>2.507.809.531</b>

Sumber Data: Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sehati tahun 2018

- 3) Keseriusan UPK Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir dalam melakukan pendataan dan pemanfaatan inventarisasi aset yang saat ini dimiliki masih sangat rendah sehingga mengakibatkan banyak aset-aset milik organisasi tidak terdata dengan baik dan banyak barang kantor dalam kondisi rusak.

**Tabel 3. Daftar Aset Milik UPK Sehati**

No	Jenis Inventaris	Tgl. Pemb	Unit	Umur Ekon	Umur Pakai	Kondisi Saat ini
1	Lap top	Mar-09	1	36	72.222	Rusak
2	Printer Canon 1980	Mar-09	1	36	19.444	Rusak
3	Meja	Des-09	1	36	9.722	Rusak Ringan
4	Rak buku	Des-09	1	36	5.556	Rusak Ringan
5	Kursi plastic	Des-09	2	36	1.389	Rusak
6	Lap Top Presario CQ42	Apr-11	1	36	129.167	Rusak
7	Printer Canon MP 258	Sep-11	1	12	70.833	Rusak
8	Camera Fuji L30. 4 GB	Okt-11	1	12	125.000	Rusak
9	Lemari Rak	Feb-12	1	12	28.333	Rusak
10	Kipas Angin Miyako	Feb-12	1	12	15.000	Rusak
11	Projektor ACER	Feb-12	1	36	106.944	Rusak
12	Printer Canon 2700	Feb-12	1	12	37.500	Rusak Ringan

13	DAT Wireless	Feb-12	1	12	100.000	Rusak Ringan
14	Kursi plastik Nopoly	Feb-12	20	36	27.222	Rusak
15	Kipas Angin Miyako	Feb-12	1	12	23.333	Rusak Ringan
16	Camera Canon	Sep-13	1	12	125.000	Rusak Ringan
17	lemari Arsip 3 pintu	Des-13	1	12	91.667	Baik
18	Meja kerja	Jan-14	1	12	24.167	Rusak
19	Laptop Acer	Mei-14	1	36	151.389	Baik
20	Laptop Acer	Apr-16	1	36	111.111	Baik

*Sumber Data: Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sehati tahun 2018*

- 4) Masih banyaknya masyarakat yang menjadi mitra UPK Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir yang kesulitan dalam mengembalikan pinjaman mereka dikarenakan usaha yang mereka kelola saat ini masih banyak yang belum berkembang sehingga berakibat kepada penunggakan pembayaran.

**Tabel. 4. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sehati Laporan Perkembangan Pinjaman**

Desa/ Kelompok	Saldo Peminjaman Kolom 13 Laporan Perkemb. Pinjaman)	Saldo Pinjaman Lancar (Tanpa Tunggaka)	Saldo Pinjaman Menunggak 1 s/d 2 Kali Angsur	Saldo Pinjaman Menunggak 3 s/d 4 Kali Angsur	Saldo Pinjaman Menunggak Lebih dari 6 Kali Angsur
		Kolek I	Kolek II	Kolek III	Kolek V
Perguliran I					
Perguliran II					
Perguliran III	6.006.000	-	-	-	6.006.000
Perguliran IV	4.051.000	-	-	-	4.051.000
Perguliran V	2.134.000	-	-	-	2.134.000
Perguliran VI	32.339.000	-	-	-	32.339.000
Perguliran VII	109.309.600	-	-	-	109.309.600
Perguliran VIII	81.903.000	-	-	-	81.903.000
Perguliran IX	20.941.000	-	935.000	20.006.000	-
Perguliran X	101.650.000	-	75.413.000	26.237.000	-
Perguliran XI	286.149.000	-	-	-	286.149.000
Perguliran XII	351.631.000	-	-	-	351.631.000
Perguliran XIII	344.974.000	344.974.000	-	-	-

*Sumber Data: Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Sehati tahun 2018*

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada Unit Pengelola Kegiatan Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada Unit Pengelola Kegiatan Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Unit Pengelola Kegiatan Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Sedangkan jumlah informan penelitian berjumlah 15 orang Sementara itu Informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini adalah Kepala UPK Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Camat Kampar Kiri Hilir dan Mitra Usaha UPK Sehati Kecamatan Kiri Hilir.

## HASIL

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada Unit Pengelola Kegiatan Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi hal penting karena dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. Apabila UPK Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir tidak dapat memenuhi kebutuhan dari 4 faktor tersebut maka akan timbul hambatan-hambatan yang dapat memicu terjadinya kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Untuk implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir secara keseluruhan belum berjalan secara efektif.

Faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada Unit Pengelola Kegiatan Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir adalah sebagai berikut:

- 1) Proses pencairan dana pinjaman ekonomi kerakyatan yang tidak jelas
- 2) Adanya penggunaan dana pinjaman oleh mitra usaha yang tidak sesuai
- 3) Penyelewengan modal usaha oleh mitra usaha
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang ada

## PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada Unit Pengelola Kegiatan Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut menjadi hal penting karena dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. Apabila UPK Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir tidak dapat memenuhi kebutuhan dari 4 faktor tersebut maka akan timbul hambatan-hambatan yang dapat memicu terjadinya kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Untuk implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yang dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir secara keseluruhan belum berjalan secara efektif.

### a. Komunikasi

Komunikasi antara pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kampar dengan UPK Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir sudah cukup baik karena setiap ada kebijakan baru Pemerin-

tah Kabupaten Kampar langsung mengkomunikasikan hal tersebut kepada UPK Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir salah satunya dengan cara diadakannya sosialisasi dan pelatihan.

b. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh UPK Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir sejauh ini tidak didukung oleh sumberdaya yang baik, mulai dari kurangnya staf UPK sampai kepada sarana dan prasarana kantor yang kurang layak untuk digunakan.

c. Disposisi

Sikap yang ditunjukkan oleh pengurus UPK Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir adalah sikap bertanggungjawab yaitu dengan berupa untuk mentaati peraturan yang ada terutama Peraturan Daerah No-mor 12 Tahun 2012

d. Struktur Birokrasi

Adanya Standar Operasional Prosedur dan koordinasi yang dilakukan pengurus UPK Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 sudah cukup memenuhi kebutuhan dari organisasi untuk mencapai kinerja kegiatan yang telah direncanakan.

mi kerakyatan pada Kecamatan Kampar Kiri Hilir sesuai dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku serta adanya peningkatan kualitas dan kuantitas para pengurus dan anggota Unit Pengelola Kegiatan Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi kebijakan dan prosedur pelaksanaan, serta pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

Pemerintah Kecamatan Kampar Kiri Hilir selaku Pembina Unit Pengelola Kegiatan Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir perlu melakukan perbaikan sistem dan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan ekonomi kerakyatan di Kecamatan Kampar Kiri Hilir, termasuk penerapan sistem akuntansi keuangan berbasis website supaya dalam pengelolaan dana Pemerintah Kabupaten Kampar lebih dilaksanakan secara profesional dan bertanggungjawab. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kampar selaku pembuat kebijakan terutama dalam pengelolaan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kampar harus lebih memotivasi para pelaksana unit pengelola kegiatan pada masing-masing kecamatan dengan cara memberikan penghargaan/reward dan sanksi kepada unit pengelola kegiatan dalam pelaksanaan kegiatannya dengan standar yang jelas, transparan, konsisten dan akuntabel.

## SIMPULAN

Untuk memperbaiki implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan pada Unit Pengelola Kegiatan Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir, hal yang perlu diperhatikan adalah pada aspek sumberdaya, baik sumberdaya manusia, anggaran maupun sarana dan prasarana. Selain itu perlunya ditingkatkan komitmen dari Pengurus Unit Pengelola Kegiatan Sehati Kecamatan Kampar Kiri Hilir selaku pelaksana dalam pengelolaan ekono-

## DAFTAR RUJUKAN

- Santoso, Slamet. 2010. *Statistika Ekonomi plus Aplikasi SPSS*, Ponorogo :Umpo Press.
- Sumodiningrat, G., 2010. "*Ekonometrika Pengantar*". Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2012-2016*